



RAPAT KOORDINASI
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
Senin, 25 Agustus 2025

TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

UNDANGAN RADIOGRAM

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA					
FORMULIR BERITA					
Register No :					
PANGGILAN		JENIS		NOMOR	
DERAJAT					
DARI : MENTERI DALAM NEGERI UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI					
KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA Nomor : 500.2.3/4701/SJ DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR ONLINE PD HARI SENIN TGL 25 AGUSTUS 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING DGN MEETING ID 677 057 3756 PASSWORD INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL YOUTUBE KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK KMA CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE BERSAMA KAPOLDA KMA PANGDAM GARING DANREM KMA KAJATI KMA SEKDA PROV KMA INSPEKTUR DAERAH PROV KMA INSPEKTUR KODAM KMA KA BAPPEDA KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR ONLINE BERSAMA KAPOLRESTABES KMA DANDIM KMA KAJARI KMA SEKDA KAB GARING KOTA KMA INSPEKTUR DAERAH KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI DRESS CODE PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA					
TANGGAL PEMBUATAN 23 Agustus 2025					
Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL		No. Kode		Waktu/pukul	
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal Tomsri Tohir				Lalu Lintas	
Tanda Tangan				Paraf Operator	

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara : Rakor Inlari via zoom

Hari/Tanggal : Senin / 25 - 08 - 2020

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	Iki uti Lani	Korotan 2	P	1
2	#KORLUKATMAN	Bag Eko C SDA	L	2
3				3
4	Indra	Eko SDA		4
5	Lina	DKP 3		5
6	Jumiaturo	DUDASPERIN		
7	Arief R.H	BPKAD	L	7
8	Sabhan Kean	Inspektoral		8
9	Lindri G. Tyas	DKP 3	P	9
10	Widada-1)	DISHOPUMNAN		10
11	HITRYAN)	DISHOPUMNAN	L	11
12	Enas	Eko SDA		12
13	Mulin	- 11 -	L	13
14	Mina	Eko SDA	P	14
15	Jasman	Ad bang		15
16	Hendry B.	Ad bang	P	16
17	Rani	Eko SDA		17
18	Istri gandi	11		18
19	Yana	11		19

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/4701/SJ Tanggal 23 Agustus 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat :

Senin, 25 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Trisakti Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
 - a) Realisasi penyaluran SPHP beras Periode penyaluran SPHP Beras dari 1 Januari s.d terkini 24 Agustus 2025 249.240 ton atau sebesar 16,62% dari target.
 - b) Rekomendasi tindak lanjut:
 - Agar perum bulog mensosialisasikan dan melatih para pedagang beras di pasar tradisional bisa menggunakan aplikasi Klik SPHP
 - Pengawasan bersama pemda dan satgas pangan POLRI
 - Publikasi penyaluran SPHP beras kepada publik secara luas dan berkelanjutan agar dapat diketahui semua
 - Mengoptimalkan sarana penyaluran SPHP beras
 - c) Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025
 - Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,85 juta ton setara beras
 - Penguatan cadangan beras pemerintah (CPP per 15 Agustus 2025 sebanyak 3,91 juta ton)
 - Penyaluran beras SPHP (realisasi tahun 2025 sebanyak 298,04 ribu ton)
 - Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 (10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta KPM selama 2 bulan Juni-Juli)
 - Gerakan pangan murah (GPM) tahun 2025 terlaksana sebanyak 6.720 kali di 315 kab/kota dan 36 provinsi.
 - Panel harga pangan selalu up to date (terdapat 1.053 enumerator yang setiap hari akan melaporkan harga terupdate di lapangan).
 - Kios pangan sebanyak 1.451 unit yang tersebar di 33 provinsi dan 118 kab/kota.
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024) (terdapat 42 sarpras)
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan (sudah terdapat 17 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan keamanan pangan pada tahun 2024)
 - Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan (gerakan ini untuk mengurangi food loss dan food waste)
 - B2SA go to school/pesantren, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi
 - Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota 45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi

2. BADAN PUSAT STATISTIK

- a) Pada M3 Agustus 2025, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 14 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah, dan beras.
- b) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH pada M3 Agustus 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH.
- c) Kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Dogiyai dengan nilai perubahan IPH 2,20%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, cabai merah dan bawang merah.

3. BULOG

- a) Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, Perum BULOG melakukan kegiatan GPM dan pemantauan langsung ke pasar tradisional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jajaran pimpinan dan tim operasional BULOG dengan melakukan giat di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- b) Perum BULOG melakukan giat penyaluran SPHP di berbagai wilayah bekerjasama dengan POLRI
- c) Program ini bertujuan menghadirkan pangan murah dengan kualitas terjamin bagi masyarakat, sekaligus memastikan akses yang merata hingga ke lapisan bawah.

4. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam upaya pengendalian inflasi:
 - Ketersediaan dan distribusi pangan pokok
 - Stabilitas energi dan transportasi
 - Pengendalian tata niaga dan rantai pasok
 - Faktor eksternal dan iklim
 - Kepatuhan terhadap regulasi
- b) Inflasi Daerah dipengaruhi oleh ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga pangan serta energi yang sering terkendala praktik spekulasi harga, rantai pasok yang Panjang dan biaya logistik
- c) Peran pengawasan hukum menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, praktek kartel, maupun penyimpangan anggaran dalam program stabilitas harga dan bantuan sosial.
- d) Rekomendasi dari Jamdatun terhadap Pemerintah Daerah:
 - Kejaksaa Bersama TPID perlu memperkuat pengawasan distribusi dan tata niaga pangan/energi melalui intelijen yustisial serta koordinasi lintas sektor untuk menekan potensi penimbunan dan permainan harga.
 - Diperlukan pendampingan hukum oleh kejaksaaan pada program-program Pemerintah terkait subsidi, pengadaan, dan bansos agar tepat sasaran, akuntabel dan tidak menjadi faktor pemicu inflasi

5. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- a) Realisasi DMO bulan Juli sebesar 215.132 ton, dan realisasi DMO per 24 Agustus sebesar 124.862 ton yang seluruhnya dalam bentuk Minyakita.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- b) Peningkatan DMO bulan Juli disebabkan oleh tren ekspor yang meningkat.
- c) Ketersediaan minyak goreng second brand dan kemasan premium mencukupi.
- d) Produsen minyak goreng memastikan pendistribusian secara efisien dan efektif dengan turut memantau jaringan distribusi seperti D1 dan D2 yang ditunjuk, serta menghilangkan eksistensi sales-middleman dalam pendistribusian DMO, serta tidak melakukan praktik bundling yang memengaruhi harga jual akhir minyaknya menjadi lebih tinggi

6. KEMENTERIAN PERTANIAN

- a) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar
- b) Rekomendasi kebijakan peningkatan produksi dan pengendalian inflasi cabai dan bawang merah:
 - Meningkatkan luas tanam cabai dan bawang merah secara mandiri baik melalui alokasi APBD ataupun memanfaatkan Dana Desa (20% untuk ketahanan pangan) dan sumber- sumber dana lainnya (CSR Perusahaan dsb) dengan memperhatikan kebutuhan bulanan, ketersediaan lahan, kesesuaian agroklimat, musim tanam, teknologi budidaya, penanganan pascapanen hingga pemasaran
 - Melakukan Kerjasama Antara Daerah (KAD) melibatkan para Champion berupa kerjasama pemenuhan pasokan dan/atau pendampingan teknis budidaya
 - Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana produksi benih dan tanaman yang sudah diberikan melalui fasilitasi APBN dan DAK Fisik seperti Nursery, Screen house, GH sederhana dll untuk memproduksi benih semai dan pertanaman cabai dan bawang merah
 - Mendorong Kelompok-Kelompok P2L yang pernah diberikan bantuan melalui APBN dan DAK Non Fisik untuk terus melakukan pertanaman cabai dipekarangan dan demplot masing-masing
- c) Strategi operasional peternakan:
 - Menyiapkan data terkait rencana produksi, harga Komoditas Peternakan, harga Sapronek (pakan) DOC secara rutin dan terupdate dalam upaya monitoring kondisi harga di daerah sentra peternakan;
 - Memberikan data dan informasi untuk wilayah yang mengalami surplus sesuai prognosa produksi, sehingga upaya intervensi distribusi penyaluran daging ayam dan/atau telur konsumsi akan lebih tepat sasaran yaitu ditujukan ke wilayah defisit atau harga yang tinggi;
 - Bersama Bapanas dan K/L terkait dalam hal penetapan kebijakan penyerapan live bird dan/atau telur konsumsi yang mengacu Harga Acuan Pemerintah (HAP) tingkat produsen/konsumen biaya produksi agar peternak memperoleh keuntungan yang wajar;
 - Bersama Bapanas dan K/L lain berupaya mengeluarkan kebijakan terkait upaya penyerapan dengan menugaskan BUMN Pangan sehingga harga di pasaran dapat lebih stabil kembali;
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian antara lain bersama Bapanas, Kemendag, BUMN Pangan dan Satgas Pangan Dinas Pangan Provinsi serta stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan penyerapan live bird dan/atau telur konsumsi di tingkat produsen dan asosiasi koperasi/pelaku usaha; dan
 - Penyiapan infrastruktur di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Air Blast Freezer (ABF) & Cold Storage.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Melakukan upaya pengendalian harga daging dengan pemantauan harga di kota-kota besar di Indonesia.
- Melakukan analisis supply demand terhadap wilayah-wilayah sentra ternak (produsen) sebagai wilayah pensupply ternak.
- Kegiatan optimalisasi reproduksi (IB) agar tetap dilaksanakan di semua provinsi tanpa dukungan anggaran APBN untuk meningkatkan kelahiran ternak.

7. KANTOR STAF PRESIDEN

- a) Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 22 Agustus 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	-	Daging Sapi, Kedelai	Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting
	Waspada		Gula Pasir Curah	Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras
	Tidak Aman			Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Beras Medium (Zona 3), Bawang Merah, Bawang Putih, Minyakita, Jagung Tk Peternak

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 22 Agustus 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Mappi	6	Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Asmat	3	Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Jayawijaya	3	Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Boven Digoel	3	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras
Kab. Paniai	3	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras
Kab. Deiyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Yalimo	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Kepulauan Tanimbar	2	Cabai Rawit Merah, Jagung Tk Peternak
Kab. Pegunungan Arfak	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Mamberamo Raya	2	Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Mamberamo Tengah	2	Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Waropen	2	Minyakita, Kedelai
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Sorong	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Karimun	2	Jagung Tk Peternak, Daging Sapi

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a) Minggu II Agustus 2025, komoditas yang mengalami kenaikan:
- Bawang merah di 308 daerah kab/kota
 - Beras di 193 daerah kab/kota
 - Cabai merah di 183 daerah kab/kota
- b) Minggu III Agustus 2025, komoditas yang mengalami kenaikan:
- Bawang merah di 309 daerah kab/kota
 - Beras di 200 daerah kab/kota
 - Cabai merah di 170 daerah kab/kota

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- c) Atensi 10 Pemda dengan IPH tertinggi/terendah pada minggu III Agustus dibandingkan minggu II Agustus 2025

KAB/KOTA	INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (%)		KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA (KENAIKAN PADA MINGGU II AGUSTUS 2025)	KETERANGAN
	MINGGU II AGUSTUS	MINGGU III AGUSTUS		
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	6.38	6.07	BERAS, BAWANG MERAH, CABAI MERAH	Belum Melaporkan Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. ACEH SINGKIL	5.32	4.92	BAWANG MERAH, CABAI MERAH, BERAS	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. SERDANG BEDAGAI	4.99	4.9	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, BAWANG MERAH	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. BATU BARA	5.06	4.78	CABAI MERAH, BERAS, DAGING AYAM RAS	Telah Melaporkan 4 s.d. 5 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. PADANG LAWAS UTARA	4.59	4.77	BERAS, CABAI MERAH, CABAI RAWIT	Belum Melaporkan Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. PESISIR SELATAN	5.12	4.64	CABAI MERAH, BAWANG MERAH, BERAS	Belum Melaporkan Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KOTA SOLOK	4.93	4.35	CABAI MERAH, BAWANG MERAH, CABAI RAWIT	Belum Melaporkan Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. NIAS SELATAN	4.67	4.28	BERAS, BAWANG MERAH, CABAI MERAH	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. LABUHANBATU UTARA	4.74	4.06	BERAS, DAGING AYAM RAS, BAWANG MERAH	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi
KAB. ACEH JAYA	4.22	3.98	BERAS, BAWANG MERAH, CABAI MERAH	Telah Melaporkan 1 s.d. 3 Upaya Kontrol Pengendalian Inflasi

KAB/KOTA	INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (%)		KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA (PENURUNAN PADA MINGGU III AGUSTUS 2025)
	MINGGU II AGUSTUS	MINGGU III AGUSTUS	
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	-7.49	-7.55	DAGING AYAM RAS, CABAI RAWIT, CABAI MERAH
KOTA TOMOHON	-5.54	-5.87	CABAI MERAH, CABAI RAWIT, BERAS
KAB. BOLAANG MONGONDOW	-5.25	-5.61	CABAI RAWIT, CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS
KAB. KEPULAUAN SANGHE	-3.94	-4	CABAI RAWIT, CABAI MERAH, BAWANG PUTIH
KAB. MELAYU	-3.78	-3.86	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, BERAS
KAB. MINAHASA	-3.39	-3.85	CABAI RAWIT, CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS
KAB. LOMBOK TIMUR	-3.56	-3.6	CABAI RAWIT, DAGING AYAM RAS, TEPUNG TERIGU
KAB. HALMAHERA SELATAN	-3.33	-3.38	CABAI MERAH, CABAI RAWIT
KAB. PASANGKAYU	-2.94	-2.84	CABAI RAWIT, DAGING AYAM RAS, BERAS
KAB. MINAHASA TENGGARA	-2.41	-2.77	CABAI MERAH, CABAI RAWIT, DAGING AYAM RAS

9. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Secara administrasi, 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR). KEMENDAGRI dan KEMENPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasi PBG dan BPHTB gratis di seluruh Indonesia.
- Pemerintah daerah wajib ikut serta menyukseskan program 3 juta rumah sebagai PSN (Pasal 67 UU No.23 tahun 2014).
- Bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan, akan menerima sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 2 kali hingga penonaktifan sementara hingga pemberhentian kepala daerah. (Pasal 68 UU No.23 Tahun 2014)
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan). Layanan ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911
- Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
- Mengimplementasikan pembebasan bea PBG dan BPHTB bagi MBR.
- Mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD 2025.
- Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.
- Melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri

10. SATGAS PANGAN POLRI

- Upaya Satgas Pangan Polri dalam pengendalian inflasi:
 - Melaksanakan rapat koordinasi terkait teknis dan sosialisasi penyaluran bantuan pangan dan SPHP beras.
 - Pembuatan surat telegram terkait jukrah pengawasan dan pengecekan langsung pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Satgas pangan pusat dan daerah aktif dalam pengawasan pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP.
 - Selain itu Satgas Pangan Polri juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses distribusi bantuan pangan dan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu sehingga beras yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat.
- b) Rekomendasi Satgas pangan Polri kepada Pemda yaitu:
- memperkuat pengawasan distribusi komoditas strategis (minyakita, beras bantuan pangan, beras SPHP/stabilisasi pasokan dan harga pangan) agar tidak terjadi penumpukan dan penimbunan di gudang-gudang dengan melibatkan K/L terkait serta satuan kewilayahan untuk menjamin keterjangkauan harga.
 - Agar Satgasda, pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan terus mengintensifkan kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah bekerja sama dengan Perum Bulog, mitra resmi koperasi, maupun outlet instansi pemerintah di wilayah masing-masing, guna mendorong percepatan dan pemerataan penyaluran beras SPHP secara masif.
 - Melaksanakan pengawasan ketat terhadap praktik penjualan beras ditingkat produsen, khususnya dalam aspek mutu, takaran dan harga jual, untuk mencegah potensi penyimpangan serta melindungi kepentingan konsumen dan kestabilan pasar.

11. TENTARA NASIONAL INDONESIA

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d Agustus 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, Bhaksos, pendampingan petani & Kementan, bazar murah/UMKM
- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
- d) TNI sudah bangun 55 BTP dan kompi produksi
- e) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk monitor serta bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-3 Agustus 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar 0,27 (inflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Bawang Merah (0,3058), Daging Sapi (0,2469), dan Telur Ayam Ras (0,0971). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi terus menerus serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Terus melakukan pemantauan harga dan menjaga stok barang agar tetap stabil
- 4) Melakukan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala
- 5) memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku: pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani
- 6) mengadakan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi lonjakan IPH
- 7) Menggunakan media lokal untuk info harga acuan terbaru, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH
- 8) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE

NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (25 Agustus 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Trisakti Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru